

**PERJANJIAN KINERJA
KETUA MAHKAMAH PELAYARAN
TAHUN 2025**



**MAHKAMAH PELAYARAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur di panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Perjanjian Kinerja Mahkamah Pelayaran dapat terselesaikan.

Perjanjian Kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Mahkamah Pelayaran berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan adanya Perjanjian Kinerja ini diharapkan agar para pemimpin mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalankan tugas.

Jakarta, 2 Januari 2025

KETUA MAHKAMAH PELAYARAN



BAITUL IHWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT ESELON II
SATUAN KERJA MAHKAMAH PELAYARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAITUL IHWAN.
Jabatan : Ketua Mahkamah Pelayaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NOVIE RIYANTO R.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Ketua Mahkamah Pelayaran


NOVIE RIYANTO R.


BAITUL IHWAN.



Kegiatan	Anggaran
1. Legislasi dan Litigasi	Rp. 120.000.000 ;
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp. 1.448.980.000 ;
3. Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran	Rp. 2.816.803.000;
4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp. 324.120.000;
5. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	Rp. 18.771.406.000;
Total	Rp. 23.481.309.000;

Jakarta, 2 Januari 2025

SEKRETARIS JENDERAL

KETUA MAHKAMAH PELAYARAN 



NOVIE RIYANTO R.



BAITUL IHWAN.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
MAHKAMAH PELAYARAN

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK 1	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	IKK 1.1	Penyelesaian Perkara Kecelakaan Kapal yang di putus Tepat Waktu	%	100
		IKK 1.2	Tindak Lanjut Rekomendasi Keputusan Sidang Mahkamah Pelayaran	%	85
		IKK 1.3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hasil Keputusan Mahkamah Pelayaran	%	100
SK 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Perkantoran	IKK 2.1	Pengelolaan Organisasi dan SDM	%	100
		IKK 2.2	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, BMN dan Umum	%	100

		IKK 2.3	Pengelolaan Dukungan Manajemen Regulasi pada Dokumen Kajian Kelembagaan.	%	100
--	--	---------	--	---	-----

KETUA MAHKAMAH PELAYARAN

